



Keterlibatan Masyarakat Menjaga Ketahanan Wilayah Akibat Bencana: Pembelajaran dari Pandemi Covid-19



Ahmad Fatkul Fikri ^{1,*}, Syamsul Maarif ², Dody Ruswandi ¹, Rustian ¹,
Catur Susilo Rahardi ¹

¹Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia

²Universitas Pertahanan Republik Indonesia

*Email: ahmadfatkulfikri02@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.33369/pendipa.9.1.58-71>

ABSTRACT

[Community Involvement Maintaining Regional Resilience Due to Disasters: Lessons from the Covid-19 Pandemic] At the beginning of 2020, Indonesia faced the non-natural disaster of the Covid-19 Pandemic. Almost all regions in the world have been infected with Covid-19, including Palopo City, and South Sulawesi Province. The Covid-19 pandemic is transmitted from human to human, so the success of tackling the Covid-19 pandemic is determined by community involvement. The period from 2020 to 2021, several sub-districts are still classified as red zones which indicates that the pandemic is still ongoing. This study aimed to analyze and describe the involvement of the people of Palopo City in overcoming the Covid-19 Pandemic. The research method used was exploratory qualitative. Primary data were obtained through in-depth interviews with government officials and representatives of civil society organizations which were determined by purposive sampling and observation at the research location. Secondary data was obtained from supporting documents such as news, regulations, reports, and photographs. The collected data was processed, analyzed and interpreted qualitatively. The findings of this study are the involvement of the Palopo City community through the Covid-19 Task Force, prevention and control, and resource mobilization. Palopo City has stable regional resilience because it has protection for the community, an effective resource management mechanism; it can develop effective work mechanisms, recover from disasters quickly, and can coexist with disaster risks.

Keywords: *Community Engagement; Covid-19; Regional Resilience.*

ABSTRAK

Pada awal tahun 2020, Indonesia menghadapi bencana nonalam Pandemi Covid-19. Hampir seluruh wilayah di dunia terjangkit Covid-19, termasuk Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan. Pandemi Covid-19 menular dari manusia ke manusia, sehingga keberhasilan penanggulangan Pandemi Covid-19 ditentukan oleh keterlibatan masyarakat. Periode 2020 sampai dengan 2021 beberapa kecamatan di Kota Palopo masih tergolong zona merah yang mengindikasikan bahwa pandemi masih terus berlangsung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan keterlibatan masyarakat Kota Palopo dalam penanggulangan Pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif eksploratif. Data primer didapatkan melalui wawancara mendalam dari unsur pemerintah dan perwakilan organisasi kemasyarakatan yang ditentukan dengan teknik *purposive sampling* dan observasi di lokasi penelitian. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen pendukung seperti, berita, peraturan, laporan-laporan, dan foto-foto. Data yang terkumpul diolah, dianalisis serta diinterpretasi secara kualitatif. Temuan hasil penelitian ini yaitu keterlibatan masyarakat Kota Palopo melalui Satgas Covid-19, pencegahan dan pengendalian, dan mobilisasi sumber daya. Kota Palopo memiliki ketahanan wilayah yang stabil dikarenakan memiliki perlindungan terhadap masyarakat, mekanisme mengelola sumber daya yang efektif;

dapat mengembangkan mekanisme kerja yang efektif, mampu segera pulih dari bencana, dan dapat hidup berdampingan dengan risiko bencana.

Kata kunci: Keterlibatan Masyarakat; Covid-19; Ketahanan Wilayah.

PENDAHULUAN

Pada awal tahun 2020, Indonesia dilanda bencana nonalam yaitu Pandemi Covid-19. Organisasi Kesehatan Dunia memaklumkan bahwa Covid-19 dinyatakan sebagai kegawatdaruratan kesehatan masyarakat pada 30 Januari 2020 dan ditetapkan sebagai pandemi pada 11 Maret 2020. Negara-negara di dunia, tidak peduli negara maju atau terbelakang, negara kaya atau miskin, semua terkena dampak Covid-19. Situasi genting yang tidak jelas dan reaksi yang bersifat *business as usual* membuat masyarakat dengan ekonomi rendah semakin termarginalkan akibat dari kerentanan yang telah terjadi sebelum pandemi sekaligus diperparah akibat pandemi (Chakraborty & Maity, 2020).

Covid-19 ditetapkan menjadi bencana nonalam oleh Pemerintah Indonesia dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Bencana Nonalam Covid-19 Sebagai Bencana Nasional. Hal ini dikarenakan Covid-19 menyebar menyeluruh di wilayah Indonesia, termasuk Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan dan mengancam kehidupan masyarakat, serta dalam penanggulangannya membutuhkan seluruh sumber daya yang dimiliki (UU No. 24 Tahun 2007). Salah satu sumber daya yang dimiliki untuk melawan pandemi Covid-19 yaitu keterlibatan komunitas.

Bencana Covid-19 menuntut masyarakat memiliki ketahanan yang nantinya akan berdampak pada ketahanan wilayah. Ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana, mampu mengurangi resiko yang mungkin terjadi (Legionosuko et al., 2019). Semakin besar daya lenting masyarakat dalam menghadapi bencana, semakin kecil dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Sebagaimana hasil penelitian Asrofi, Hardoyo, and Sri Hadmoko (2017a) di pesisir utara Demak Jawa Tengah yang meneliti bencana alam bahwa masyarakat mengalami perubahan status ekonomi yang dikarenakan penghasilan yang menurun. Hal tersebut terjadi karena

masyarakat tidak memiliki ketahanan yang baik dalam menghadapi bencana.

Keadaan ketahanan wilayah dipengaruhi oleh beberapa macam jenis tekanan, dapat disebabkan secara endogen seperti tekanan yang muncul dari rangkaian alur maupun secara eksogen seperti tekanan yang muncul dari luar rangkaian alur (Asrofi et al., 2017b). Ketahanan wilayah memiliki arti suatu wilayah dengan berbagai dinamika masyarakat yang terpadu yang berisi keuletan dan ketangguhan masyarakat untuk menangkis seluruh ancaman dan tantangan yang datang, gangguan dan hambatan dari dalam terhadap keberlangsungan hidup, integritas, dan identitas mereka (Anwar, Winarna, and Suharto 2020). Ketahanan nasional akan tercapai ketika ketahanan wilayah yang merupakan bentuk mikro tercapai, yang mana seluruh aspek pada ketahanan wilayah akan berimplikasi kepada ketahanan nasional sebagaimana wujud resiliensi yang sesungguhnya (Alfaqi, Habibi, and Rapita 2017).

Ketahanan wilayah didefinisikan berdasarkan tiga karakteristik yaitu, stabilitas, kemampuan pemulihan dini, dan inovasi (Peng et al. 2016). Stabilitas mengacu pada kemampuan untuk mengantisipasi, mempersiapkan, merespon, memulihkan ketika suatu wilayah menghadapi gangguan dari luar (Dabson, Heflin, and Miller 2012). Pandangan dari Wilbanks (2008) dalam Peng et al. (2016) kemampuan memulihkan dini berarti kemampuan memberikan respon yang tepat waktu, efektif, adil dan wajar terhadap situasi darurat dengan tujuan memastikan pemulihan yang lebih cepat, lebih baik, lebih aman, dan lebih adil. Inovasi mengacu pada fitur bahwa suatu wilayah dapat mengembalikan situasi awal tanpa mengubah sistem, struktur dan fungsi atau mengubah karakteristik suatu wilayah tersebut (Hill, Wial, and Wolman 2008).

Ketahanan bencana adalah konsep yang logis dan signifikan yang berguna bagi individu, organisasi, komunitas, pihak swasta, dan

pemerintah (Parsons et al. 2016). Ketahanan yang digunakan di sini menyiratkan kemampuan suatu sistem untuk melawan bencana alam dan kembali ke keseimbangan prabencana (Kohlitz, Chong, and Willetts 2017), meningkatkan kesiapsiagaan bencana di masyarakat, dan mempercepat proses pemulihan (Marzi et al. 2019). Konsekuensi yang merugikan dari suatu bencana lebih sedikit di masyarakat yang tangguh karena durasi pemulihan pascabencana yang lebih singkat (Yoon, Kang, and Brody 2016). Dengan demikian, penilaian ketangguhan bencana merupakan komponen vital dari manajemen dan perencanaan bencana (Parsons et al. 2016), untuk memitigasi korban jiwa dan pemulihan yang cepat (Song and Park 2019).

Pada umumnya, penanganan kegawatdaruratan kesehatan masyarakat dilakukan melalui pendekatan top-down oleh pemerintah dan otoritas kesehatan, keterlibatan komunitas sangat sedikit. Padahal, keterlibatan masyarakat dalam kesehatan masyarakat memiliki efektivitas yang tinggi dalam rangka meningkatkan hasil kesehatan dan memberikan dukungan sosial bagi masyarakat yang kurang beruntung/miskin (O'Mara-Eves et al. 2013). Cerita sukses keterlibatan masyarakat dalam penanganan kegawatdaruratan kesehatan masyarakat terlihat dari penanganan wabah Ebola di Sierra Leone 2014, kematian anak akibat Malaria di Ethiopia, dan pengurangan prevalensi HIV di kalangan pekerja seks, pemuda, dan masyarakat umum (Li et al. 2016; Okwundu et al. 2013; Questa et al. 2020). Selain itu, keterlibatan masyarakat juga mampu mengatasi kegawatdaruratan wabah kolera di Zimbabwe (Mukuruva 2012).

Keterlibatan masyarakat telah digunakan dalam berbagai konteks termasuk kegiatan promosi kesehatan dan pencegahan penyakit, perlindungan lingkungan, dan studi bencana. Keterlibatan masyarakat yang sukses membutuhkan keterlibatan aktif anggota masyarakat dalam desain program, kepemimpinan, implementasi, serta pemantauan dan evaluasi (Frimpong and Paintsil 2023). Strategi keterlibatan masyarakat menghindari interaksi top down antara intervensi masyarakat dan anggota masyarakat (Wallerstein, Yen, and Syme 2011). Keterlibatan masyarakat dapat mendesentralisasikan kekuasaan, mengintervensi

pengambil kebijakan, dan menciptakan tanggung jawab bersama dalam rangka menentukan program yang sesuai dengan kondisi lokal dan berkelanjutan.

Pemerintah Kota Palopo mengumumkan kasus pertama Covid-19 pada tanggal 29 April 2020. Pasien pertama ini diduga terjangkit virus ini setelah melakukan perjalanan dari Makassar yang merupakan episentrum Covid-19 di Sulawesi Selatan. Sejak saat itu kasus pasien terjangkit Covid-19 terus mengalami kenaikan. Pada Juli 2021 kota ini berada pada gelombang kedua penularan Covid-19 sampai November 2022, Kota Palopo memiliki 3.187 kasus dan 114 jiwa meninggal dunia. Hasil pengamatan awal peneliti menunjukkan bahwa tingkat kenaikan penularan Covid-19 di Kota Palopo diakibatkan oleh tingkat mobilitas yang tinggi dan sikap masyarakat yang acuh tak acuh terhadap ketaatan menjalankan protokol kesehatan.

Pelanggaran terhadap protokol kesehatan menjadi faktor utama penyebaran Covid-19. Pelanggaran tersebut dikarenakan kebutuhan ekonomi (Sulistiani and Wijaya 2021). Larangan mudik oleh pemerintah tidak menjadi alasan masyarakat untuk pulang ke kampung halaman. Ratusan masyarakat tiba di Sulawesi Selatan dari Surabaya, Kendari dan Kalimantan menggunakan kapal (Emba 2021; KompasTVMakassar 2021). Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap urgensi dari penerapan protokol kesehatan dan bahaya Covid-19 (Rijal, Darlin, and Haz 2021; Sumanti et al. 2022). Padahal kepatuhan disiplin protokol kesehatan mampu mencegah penularan Covid-19 (Pasaribu et al. 2021).

Salah satu strategi yang dijalankan dalam rangka menghadapi Covid-19 yaitu melibatkan komunitas-komunitas yang ada di Kota Palopo, terutama pada masyarakat dengan tingkat kerawanan tinggi. Komunitas-komunitas tersebut lahir atas dasar kesadaran untuk mengatasi masalah yang bertumpu pada sumber daya sendiri. Hal ini dapat diartikan bahwa masih ada keinginan masyarakat untuk bekerja sama dalam rangka mengurangi dampak akibat Pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sejauhmana keterlibatan masyarakat mampu meningkatkan ketahanan wilayah akibat dari pandemi Covid-19.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan yaitu kualitatif eksploratif. Hal tersebut memiliki arti bahwa penelitian ini digunakan untuk mengamati dan mengeksplorasi secara mendalam suatu kejadian sosial dan masalah manusia. Data primer didapatkan melalui wawancara mendalam dari unsur pemerintah dan perwakilan organisasi kemasyarakatan yang ditentukan dengan teknik *purposive sampling* dan observasi di lokasi penelitian. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen pendukung seperti, berita, peraturan, laporan-laporan, dan foto-foto.

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan model interaksi yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, and Saldana (2014). Model analisis dengan menggunakan model interaktif memiliki arti bahwa data yang diperoleh dilakukan analisis dengan interaktif secara terus menerus, sampai data tersebut bosan. Miles et al. (2014) menjelaskan komponen untuk menganalisis data terdiri dari pengumpulan data (*data collection*), kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*) dan verifikasi data / kesimpulan (*conclusions: drawing/verifying*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterlibatan dalam Satuan Tugas Penanganan Covid-19

Menyadari tingkat penyebaran Covid-19 yang semakin meluas, pemerintah memutuskan untuk membuat sebuah komite *ad hoq* yang secara khusus menangani pandemi Covid-19. Pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pada 13 Maret 2020. Gugus tugas tersebut terdiri dari unsur pengarah dan pelaksana. Unsur pengarah memiliki tugas memberikan arahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi penanganan Covid-19. Unsur pelaksana memiliki tugas menetapkan rencana operasional, mengoordinasikan pelaksanaan, pengawasan, mengerahkan sumber daya, dan melaporkan penanganan Covid-19.

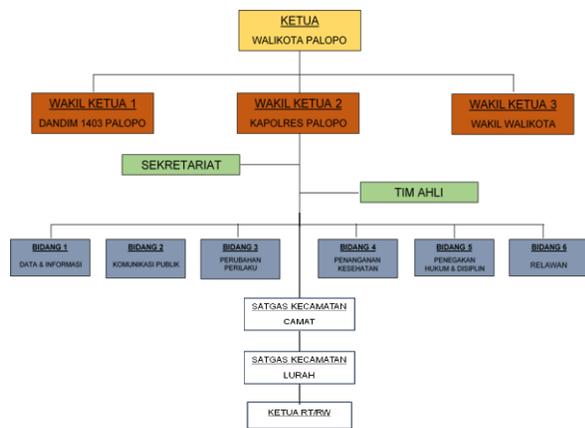
Gugus tugas ini terdiri dari perwakilan setiap kementerian/lembaga, kepolisian, Tentara Nasional Indonesia (TNI). Seluruh unsur memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas dan kapasitas. Misalnya, Kementerian Kesehatan bertugas *tracing, tracking, dan testing* Covid-19. Selain itu, Kementerian Kesehatan juga bertugas merawat pasien-pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19. Kementerian Perhubungan dan Kementerian Luar Negeri memiliki tanggung jawab untuk membatasi mobilitas masyarakat dari dan ke luar negeri. Kementerian Pendidikan memiliki tanggung jawab untuk menunda proses belajar mengajar secara luring untuk sementara dan menyediakan pembelajaran secara daring. Kementerian Dalam Negeri mengoordinasikan penanggulangan pandemi Covid-19 dengan pemerintah daerah.

Penanggulangan pandemi Covid-19 sangat tepat dilakukan melalui kerja sama multi sektor di bawah kepemimpinan pemerintahan yang kuat (Ha et al., 2021). Selain peran teknis kesehatan, masyarakat juga memiliki peran penting untuk menjaga dan mengawasi mobilitas sekitar rumah mereka. Peran serta masyarakat ini merupakan bukti kemitraan yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Kolaborasi lintas sektor juga dapat memperkuat struktur tata kelola dan menciptakan kemitraan yang baik diseluruh tingkat nasional maupun daerah (Atkinson et al., 2011).

Pemerintah Kota Palopo membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 kemudian diganti menjadi Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan Covid-19 yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Palopo. Sebagaimana Satuan Tugas Covid-19 yang berada di tingkat pusat, Satuan Tugas Covid-19 di Kota Palopo juga terdiri Pemerintah Kota Palopo, Kepolisian dan TNI. Dinas Kesehatan Kota Palopo sebagai *leading sector* penanganan Covid-19 di Kota Palopo.

Pemerintah Kota Palopo membentuk Satuan Tugas di tingkat kelurahan. Satuan Tugas ini melibatkan terdiri dari Ketua Rukun Warga

(RW), Ketua Rukun Tetangga (RT), tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Tugas utama dari Satuan Tugas di tingkat kelurahan yaitu melakukan himbauan kepada masyarakat, identifikasi masyarakat rentan, melaporkan mobilitas masyarakat ke tingkat yang lebih tinggi untuk melakukan isolasi, pencegahan dan pengendalian penyebaran (memakai masker, penyemprotan disinfektan, pengukuran suhu tubuh, dan manajemen kerumunan). Berikut struktur keterlibatan masyarakat dalam Satgas Penanganan Covid-19.



Gambar 1. Struktur Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Kota Palopo.

Komite Covid-19 di tingkat lokal, yang terdiri dari unsur kesehatan, keamanan, dan organisasi kemasyarakatan memberikan dampak positif terhadap pengendalian dan pencegahan Covid-19. Hal ini dikarenakan unsur tersebut memberikan fasilitas penerapan langkah-langkah kesehatan masyarakat. Pembentukan komite Covid-19 di tingkat lokal (kabupaten/kota) mampu membantu komunitas untuk menyusun rencana aksi dan strategi penanggulangan pandemi dan mengimplementasikan melalui sumber daya yang dimiliki (Al Siyabi et al. 2021). Seorang kepala daerah (Bupati/Wali Kota) memiliki tugas mengoordinasikan penyebaran informasi tentang risiko Covid-19 (Khanna et al. 2020).

Keterlibatan Masyarakat dalam Pengendalian dan Pencegahan Covid-19

Beberapa tindakan dilaksanakan oleh masyarakat untuk mencegah dan mengendalikan Covid-19. Pada prinsipnya masyarakat terlibat dalam prinsip utama pencegahan dan pengendalian Covid-19 yaitu karantina diri dengan sebutan gerakan “di rumah aja” dan taat protokol kesehatan dengan sebutan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan). Gerakan ini atas dasar dorongan dan himbauan dari pemerintah.

Pada lingkungan masyarakat, masyarakat melakukan ketentuan-ketentuan pencegahan dan pengendalian di tempat kerja, ruang publik, dan rumah mereka. Seluruh masyarakat harus mengukur suhu tubuh di pintu masuk kedatangan, memakai masker, mencuci tangan dengan bersih, dan menjaga jarak 1-2 meter dari orang lain di tempat kerja dan ruang rapat. Selain itu, masyarakat juga secara inisiatif melakukan tindakan-tindakan pencegahan dan pengendalian Covid-19. Gerakan tersebut seperti penyemprotan dan penutupan lorong-lorong jalan masuk ke wilayah. Palang pintu tersebut dijaga oleh pemuda-pemudi sekitar untuk mengawasi penduduk yang masuk dan keluar dari wilayah tersebut. Penjaga melakukan pendataan terhadap tamu yang masuk dan memberlakukan jam malam untuk selanjutnya di laporkan kepada Ketua RT dan Ketua RW.

Pada masa gawat darurat Covid-19, sebagian besar masyarakat mematuhi aturan pencegahan dan pengendalian Covid-19. Masyarakat mengenakan masker ketika berada di tempat-tempat umum. Ketika libur lebaran, natal dan baru, beberapa dari masyarakat juga tidak pulang kampung atau mudik dikarenakan takut menularkan kepada keluarganya. Kepatuhan tersebut sebagaimana terlihat pada Gambar 2.

Kepatuhan sebagian besar masyarakat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat kepada pihak pemerintah. Kepercayaan merupakan komponen penting dari keterlibatan

masyarakat, apabila masyarakat tidak percaya terhadap pemerintah, mereka akan keluar dari sistem yang dibuat oleh pemerintah dan keluar dari bimbingan masyarakat (Gilson 2003; Hurley 2006). Hasil studi yang dilakukan oleh Ha et al. (2021) kepatuhan masyarakat dipengaruhi oleh langkah-langkah pemerintah yang kuat dalam pengendalian dan pencegahan Covid-19. Hubungan yang kuat antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk mengurangi risiko Covid-19. Hasil penelitian kami juga menunjukkan bahwa membangun interaksi dan mempertahankan kepercayaan masyarakat akan memberikan kekuatan kepada pemerintah.



Gambar 2. Penerapan *Social Distancing* pada Saat Rapat di Pemerintah Kota Palopo

Mobilisasi Sumber Daya untuk Masyarakat yang Membutuhkan

Pencegahan dan pengendalian Covid-19 membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit. Seluruh masyarakat Kota Palopo, baik secara individu maupun Organisasi Kemasyarakatan memberikan sumbangsih dalam penanganan Covid-19. Beberapa dukungan yang diberikan diantaranya, makanan siap saji, makanan jadi, vitamin, susu, beras, cairan pencuci tangan, masker, dan bahan disinfektan.

Mobilisasi sumber daya dipelopori oleh pemerintah, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Salah satu aspek penting untuk memobilisasi sumber daya yaitu

tokoh yang memiliki pengaruh di lingkungan. Komitmen tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan merupakan dasar untuk membantu pemerintah menghilangkan prasangka dan mitos di lingkungan masyarakat (Gilmore et al. 2020). Mereka adalah pemilik pengaruh dan pengetahuan, maka dari itu, mereka adalah aset berkelanjutan yang tidak boleh diabaikan dalam program pemerintah apapun, termasuk pengendalian dan pencegahan penyakit menular.

Beberapa organisasi memberikan bantuan berupa Alat Pengaman Diri (APD) (masker, handsanitizer, bahan disinfektan), bahan pokok, multivitamin, dan uang tunai. Selain itu, masyarakat secara swadaya membentuk kelompok-kelompok digital dalam rangka menyampaikan infografis, berita-berita yang terkait dengan Covid-19. Masyarakat juga membentuk komunitas Emergency Medical Responder Covid-19. Komunitas ini beranggotakan dokter, perawat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga ahli teknologi informasi. Komunitas ini membantu pemerintah secara mandiri melakukan *testing, screening, dan tracing* kepada masyarakat.



Gambar 3. PSC 119 Kota Palopo dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19

Secara individu, masyarakat juga memberikan bantuan bahan makanan. Bantuan tersebut diberikan kepada tetangga sekitar yang tidak mampu. Ketika terdapat tetangga yang sedang melakukan isolasi mandiri akibat terkonfirmasi Covid-19, tetangga sekitar rumah

memberikan makanan siap saji (mie instan, telur) dan makanan siap makan dengan menggantungkan di pagar rumah mereka. Selain itu, ketika rumah tetangga kosong akibat penghuni rumah sedang melakukan perawatan di rumah sakit atau puskesmas, tetangga yang lain menjaga keamanan rumah tersebut.

Masyarakat secara individu juga mengajukan diri sebagai relawan Covid-19. Tugas dari relawan ini memberikan informasi kepada masyarakat yang terkait dengan Covid-19. Relawan tersebut bergabung dengan Satuan Tugas Covid-19 Kota Palopo maupun komunitas-komunitas kemasyarakatan. Relawan atau sukarelawan bergerak secara mandiri karena panggilan jiwa untuk berbagi. Kegiatan sukarela merupakan kegiatan formal maupun informal yang dilakukan dengan sadar, tanpa paksaan, tidak dibayar, dan bermanfaat bagi masyarakat atau komunitas lain.

Dalam rangka mengatasi Covid-19 dan implikasinya membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit. Hal ini dilakukan guna menyediakan sarana, prasarana, fasilitas, dan sistem kesehatan, serta mengelola dampak sosial ekonomi sebagai konsekuensi dari kebijakan pembatasan kegiatan sosial masyarakat. Bisa disaksikan berbagai negara di dunia mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki dalam rangka melindungi ekonomi dan kehidupan sehari-hari dengan memberikan bantuan subsidi dan jaring pengaman sosial. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kesuksesan penanggulangan pandemi Covid-19 yaitu pengelolaan sumber daya yang baik, karena kegagalan mobilisasi sumber daya akan melahirkan kerentanan yang semakin dalam (Masudi and Winanti 2020).

Sisi lain menunjukan bahwa masyarakat secara mandiri melakukan mobilisasi sumber daya. Bentuk mobilisasi sumber daya yang dilakukan yaitu filantropi, voluntarisme, dan tumbuhnya solidaritas sosial yang luas. Hal tersebut sebagaimana penelitian yang

dilaksanakan oleh Simsa (2019) yang menunjukan bahwa pada masa pandemi, memobilisasi sumber daya yang dimiliki dapat dilakukan secara mandiri. Bentuk mobilisasi sumber daya yang bersifat organik mencerminkan semangat masyarakat dalam sistem sosial. Segala bentuk solidaritas juga membuktikan bahwa komunitas mempunyai kesadaran Covid-19 bukan masalah individu atau kelompok tertentu saja, melainkan masalah bersama (Masudi and Winanti 2020).

Ketahanan Wilayah Akibat Covid-19: Keterlibatan Masyarakat

Berangkat dari landasan teori penelitian ini bahwa ketahanan wilayah merupakan bentuk mikro dari ketahanan nasional, yang mana setiap aspek dari ketahanan wilayah akan berdampak pada ketahanan nasional. Sebagai negara yang menerapkan asas otonomi, ketahanan nasional harus dibangun melalui ketahanan di daerah. Upaya mewujudkan ketahanan wilayah harus dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Hal tersebut harus dilakukan atas dasar kolaborasi seluruh pihak yang berada di wilayah tersebut.

Upaya pencapaian ketahanan wilayah oleh pemerintah daerah akan sia-sia apabila tidak diimbangi dengan peran serta masyarakat. Keterlibatan masyarakat sangat diperlukan untuk mengoptimalkan kekuatan ketahanan wilayah. Ketahanan wilayah akan mencapai kestabilan apabila setiap elemen baik pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat dapat berjalan beriringan, saling mengawasi, dan mendukung satu sama lain (Alfaqi et al., 2017). Kondisi tersebut akan menciptakan kekuatan yang luar biasa untuk meningkatkan kekuatan ketahanan wilayah, dan pada akhirnya akan menciptakan kesejahteraan masyarakat, karena ketahanan dan kesejahteraan saling berkelindan.

Keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan pandemi Covid-19 merupakan salah satu langkah untuk mendukung ketahanan

wilayah di Kota Palopo. Pandemi Covid-19 secara nyata dapat mengganggu ketahanan nasional (Suherningtyas et al., 2021). Suatu wilayah dapat dikatakan memiliki ketahanan apabila wilayah tersebut saling melindungi masyarakatnya, mengelola sumber daya yang efektif, mengembangkan mekanisme kerja yang efektif, segera pulih dari bencana, dan mengubah ancaman menjadi peluang.

Pertama, Melindungi masyarakat. Upaya melindungi masyarakat yang dimaksud yaitu melindungi masyarakat dari berbagai macam ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, termasuk Covid-19. Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan terhadap masyarakat dari Covid-19 yaitu vaksinasi dan pembatasan kegiatan sosial masyarakat. Vaksinasi dilakukan untuk meningkatkan kekebalan seseorang terhadap Covid-19. Realisasi vaksinasi di Kota Palopo dosis pertama mencapai 82%, dosis kedua mencapai 60,07%, dan dosis ketiga 19,26%. Upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memperbesar keterlibatan masyarakat untuk melakukan vaksinasi yaitu dengan cara menunda penyerahan bantuan, tidak melayani administrasi pemerintahan, dan denda. Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa vaksin merupakan kewajiban sebagai warga negara, padahal vaksin merupakan hak sebagai warga negara.

Komitmen pemerintah dalam melindungi warga negaranya tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa negara memiliki tujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Selain itu, Perka BNPB Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, mengatur hak masyarakat untuk mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, terutama dari masyarakat

yang memiliki kerentanan terhadap ancaman risiko bencana.

Sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia dan masuk ke Palopo pada April 2020, Covid-19 telah merenggut 100 jiwa nyawa masyarakat Kota Palopo. Permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam menghadapi Covid-19 terletak pada penempatan masyarakat sebagai objek. Padahal dalam menilai keberhasilan penanggulangan pandemi Covid-19 sangat bergantung pada kebijakan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek yang berhak mempunyai kehidupan yang bermartabat serta memiliki komitmen untuk melindungi, menyelamatkan, dan memperbaiki kehidupan masyarakat (Masudi & Winanti, 2020).

Pembatasan kegiatan sosial masyarakat dilakukan pemerintah untuk mengurangi mobilitas masyarakat. Upaya pembatasan kegiatan sosial masyarakat pada awal pandemi Covid-19 di Kota Palopo yaitu dengan membentuk empat titik penyekatan perbatasan kota, yaitu, Kecamatan Telluwanua, Kecamatan Wara Selatan, Kecamatan Wara Barat, dan Kecamatan Mungkajang. Empat kecamatan tersebut merupakan daerah perbatasan langsung dengan Kabupaten Luwu dan Kabupaten Toraja Utara. Selain itu, pemerintah tidak sedikit menerbitkan surat edaran tentang pembatasan kegiatan sosial masyarakat diantaranya, penertiban rumah makan, peliburan sekolah, penutupan tempat wisata, dan pembatasan tempat ibadah.

Upaya pemerintah Kota Palopo melakukan pembatasan kegiatan sosial masyarakat mencerminkan kesigapan Pemerintah Kota Palopo untuk melindungi masyarakat dari fenomena bencana nonalam tersebut. Karakteristik masyarakat Kota Palopo yang senang bersosialisasi memberikan tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kota Palopo untuk menerapkan kebijakan tersebut. Selain itu, mudik merupakan kegiatan yang sudah menjadi budaya masyarakat Kota Palopo bahkan Indonesia, yang

mana pemerintah selalu hadir dalam memberikan fasilitas demi kenyamanan merayakan hari raya. Akan tetapi, dalam keadaan bencana, pemerintah diamanatkan oleh konstitusi untuk melarang mudik demi menjamin keselamatan dan kelangsungan masyarakat Kota Palopo. Selain itu, kebutuhan ekonomi yang mendesak yang mengharuskan masyarakat tetap melakukan mobilitas di luar rumah.

Keterlibatan masyarakat dalam pembatasan kegiatan sosial yaitu dengan cara mengawasi dan melaporkan tetangga yang melakukan mobilitas kepada Ketua RT/RW, tidak mengadakan acara yang dapat menimbulkan kerumunan. Tindakan yang sama juga dilakukan oleh beberapa daerah yang secara mandiri melakukan karantina wilayah, seperti Kota Tegal. Cerita sukses penanggulangan pandemi Covid-19 dengan melakukan pembatasan sosial masyarakat yaitu Taiwan, Korea Selatan, dan Singapura (Masudi & Winanti, 2020). Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali di Kota Denpasar dapat mengurangi tingkat penyebaran Covid-19 (Dewi & Sunarta, 2021).

Respon pandemi Covid-19 yang cenderung membatasi kegiatan sosial masyarakat juga bertujuan untuk menjaga keamanan di wilayah masing-masing, bahkan negara masing-masing. Kecenderungan terhadap melindungi warga negara wajar dilakukan. Contoh nyata dari kuatnya narasi melindungi warga negara dari Covid-19 yaitu sikap Amerika Serikat yang berupaya mengumpulkan suplai medis yang seharusnya dikirimkan ke Jerman dan Kanada (Whalen et al., 2020). Hal tersebut dikarenakan sebagian besar negara menganggap bahwa pandemi Covid-19 sebagai ancaman nontradisional yang serius. Dalam logika keamanan, ancaman (teroris dan pandemi) dianggap sebagai gangguan serius yang harus segera dihilangkan. Seluruh negara akan mengeluarkan seluruh kemampuan dengan kapasitas yang dimiliki untuk menyelamatkan

warga negaranya dari wabah ini (Masudi & Winanti, 2020).

Kedua, Pengelolaan Sumber daya. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengelolaan sumber daya di Kota Palopo berkaitan dengan penanggulangan pandemi Covid-19 yaitu mengeluarkan kemampuan yang dimiliki dari segi sarana dan prasarana, pendanaan, dan sumber daya manusia. Pemerintah menyediakan seluruh rumah sakit yang dimiliki pemerintah dan swasta di Kota Palopo untuk menjadi rujukan pasien Covid-19. Jumlah rumah sakit yang dimiliki oleh pemerintah dan swasta yaitu delapan rumah sakit dengan ketersediaan tempat tidur berjumlah 927. Selain itu, Pemerintah Kota Palopo bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyediakan tempat wisata duta Covid-19.

Pengelolaan sumber daya manusia penanganan Covid-19 perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Hal tersebut dikarenakan bahwa pada awal pandemi Covid-19 melanda Kota Palopo, tenaga kesehatan yang telah melaksanakan pelatihan wabah tidak dilibatkan dalam penentuan kebijakan. Data pegawai yang telah melaksanakan pendidikan dan pelatihan pengendalian wabah tidak terinventarisasi dengan baik di Dinas Kesehatan Kota Palopo. Selain itu, rotasi pegawai yang sangat cepat sehingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia tidak berjalan dengan baik.

Dalam rangka mengatasi Covid-19 dan implikasinya membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit. Hal ini dilakukan guna menyediakan sarana, prasarana, fasilitas, dan sistem kesehatan, serta mengelola dampak sosial ekonomi sebagai konsekuensi dari kebijakan pembatasan kegiatan sosial masyarakat. Bisa disaksikan berbagai negara di dunia mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki dalam rangka melindungi ekonomi dan kehidupan sehari-hari dengan memberikan bantuan subsidi dan jaring pengaman sosial. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat

kesuksesan penanggulangan pandemi Covid-19 yaitu pengelolaan sumber daya yang baik, karena kegagalan mobilisasi sumber daya akan melahirkan kerentanan yang semakin dalam (Masudi & Winanti, 2020). Salah satu kebijakan yang umum diambil yaitu refofusing dan realokasi anggaran yang digunakan untuk penanganan Covid-19. Responsivitas juga dapat tercermin dari kemampuan mobilisasi dan mengelola sumber daya dengan benar dalam rangka mengatasi kegawatdaruratan dan dampaknya.

Sisi lain menunjukan bahwa masyarakat secara mandiri melakukan mobilisasi sumber daya. Bentuk mobilisasi sumber daya yang dilakukan yaitu filantropi, voluntarisme, dan tumbuhnya solidaritas sosial yang luas. Hal tersebut sebagaimana penelitian yang dilaksanakan oleh Simsa et al. (2019) yang menunjukkan bahwa pada masa pandemi, memobilisasi sumber daya yang dimiliki dapat dilakukan secara mandiri. Bentuk mobilisasi sumber daya yang bersifat organik mencerminkan semangat masyarakat dalam sistem sosial. Segala bentuk solidaritas juga membuktikan bahwa komunitas mempunyai kesadaran Covid-19 bukan masalah individu atau kelompok tertentu saja, melainkan masalah bersama (Masudi & Winanti, 2020).

Ketiga, Pengembangan Mekanisme Kerja. Mekanisme kerja Pemerintah Kota Palopo melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan masyarakat terkait dengan mekanisme kerja penanggulangan pandemi Covid-19 yaitu, komunikasi, pemantauan dan penyebaran informasi, penanganan kesehatan, penegakkan disiplin, dan relawan. Kelima mekanisme kerja kolaboratif tersebut saling berkaitan dan berdampak satu sama lain. Komunikasi yang terjadi dalam penanggulangan pandemi Covid-19 melalui media formal dan nonformal. Komunikasi dibutuhkan untuk melakukan koordinasi dengan

berbagai pemangku kepentingan. Komunikasi yang dilakukan antar pemangku kepentingan sudah terintegrasi dan terstruktur. Hal ini mempermudah dalam kegiatan memperoleh data untuk dilakukan penyebaran informasi kepada masyarakat secara cepat dan tepat.

Covid-19 telah melahirkan krisis tata kelola penanganan di dunia sampai ke tingkat lokal. Dunia dibuat kebingungan dengan mekanisme kerja yang efektif, sehingga memaksa pemerintah pusat dan daerah cenderung memberikan keputusan yang bersifat uji coba. Pandemi Covid-19 menimbulkan tantangan pengelolaan kegawatdaruratan pandemi yang bersifat susah diprediksi dalam konteks nasional dan global. Secara garis besar mekanisme kerja yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palopo dalam penanggulangan Covid-19 menjadi dua bagian, yaitu pencegahan dan perawatan.

Mekanisme pencegahan yang dimaksud yaitu mekanisme penanganan sebelum rumah sakit dan mekanisme perawatan yang dimaksud yaitu penanganan selama di rumah sakit. Mekanisme penanganan sebelum rumah sakit yaitu, penanganan pencegahan sebelum masyarakat tertular Covid-19, seperti mengedukasi masyarakat, menjaga jarak, memakai masker. Mekanisme penanganan selama di rumah sakit yaitu proses peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan, seperti mewajibkan rumah sakit menyediakan tempat untuk pasien Covid-19 minimal 30 persen dari kapasitas rumah sakit.

Proses pencegahan dilakukan dengan cara komunikasi, pemantauan dan penyebaran informasi, dan penegakkan disiplin. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Masudi & Winanti, 2020) menjelaskan tiga dari empat negara, yaitu Taiwan, Korea Selatan, dan Singapura berhasil mengendalikan Covid-19 dikarenakan mekanisme kerja yang efektif melalui perencanaan, koordinasi kelembagaan dan komunikasi, penyediaan data dan informasi

yang akurat. Selain itu, ketiga negara tersebut secara tegas melakukan pembatasan kegiatan masyarakat setelah ditemukan transmisi lokal. Mekanisme perawatan memiliki arti bahwa pasien yang telah terkonfirmasi positif Covid-19 dilakukan perawatan di rumah sakit. Pemerintah berusaha melakukan peningkatan kapasitas kesehatan yang berada di Kota Palopo. Peningkatan kapasitas kesehatan ini dilakukan melalui dua pendekatan yaitu, *surge capacity in hospital* dan *surge hospital* (Mahendradhata et al., 2021).

Keempat, proses pemulihan. Upaya pemerintah Kota Palopo dalam rangka pemulihan pasca Covid-19 belum terlihat maksimal. Proses pemulihan masih sebatas pada kegiatan-kegiatan pencegahan. Sementara bantuan stimulus bagi pelaku usaha diberikan oleh pemerintah Kota Palopo berdasarkan bantuan dari pemerintah pusat. Kerja keras harus dilakukan oleh pemerintah Kota Palopo untuk memulihkan kembali pasca pandemi Covid-19. Strategi kebijakan di sektor ekonomi dan pendidikan menjadi prioritas dalam penanganan pasca pandemi Covid-19. Kerja sama seluruh *stakeholder* untuk mengembalikan proses pembangunan Kota Palopo. Anak-anak usia sekolah yang seharusnya mendapatkan pendidikan dengan baik, namun selama pandemi lebih banyak belajar di rumah. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia Kota Palopo di masa yang akan datang. Selain itu, masyarakat yang telah terinfeksi Covid-19 mengalami gangguan sistem dalam tubuh.

Dampak Covid-19 yang paling dirasakan yaitu sosial ekonomi. Pandemi Covid-19 membuat kelompok yang terpinggirkan secara sosial semakin rentan bahkan berpotensi menimbulkan kelompok-kelompok marjinal baru (Masudi & Winanti, 2020). Selain itu, potensi yang menimbulkan masalah yaitu kapasitas kesehatan. *Supply* sektor kesehatan, seperti fasilitas dan tenaga kesehatan di Indonesia masih

kurang merata, jika dibandingkan dengan negara maju (Wardhana, 2020), akan tetapi tren positif telah terlihat meskipun tantangan berikutnya yaitu kemudahan akses kesehatan bagi seluruh warga negara (Agustina et al., 2019). Maka dari itu, untuk mengurangi dampak tersebut diperlukan strategi proses pemulihan pasca Covid-19 yang efektif.

Kebijakan proses pemulihan akan mencapai kesuksesan ketika kebijakan tersebut mampu: memberikan pemahaman kepada kelompok rentan dari berbagai faktor sudut pandang yang memungkinkan menjadikan kelompok rentan baru yang terpinggirkan secara sosial (Hankivsky et al., 2014). Kedua, memanfaatkan isu kesehatan masyarakat sebagai titik awal penyelesaian inklusifitas keadilan sosial (Silva et al., 2013). Ketiga, memperlakukan manusia bukan statistik semata, namun sebagai supek yang berhak memiliki kehidupan bermartabat, serta dapat melindungi kondisi kehidupannya (Masudi & Winanti, 2020). Teorema yang mendasari pelibatan masyarakat dalam penanggulangan pandemi Covid-19 adalah pemulihan sangat tergantung pada sumber daya lokal, semakin masyarakat terlibat secara aktif, maka akan semakin cepat proses pemulihan.

Kelima, Sejarah menunjukkan bahwa wabah Covid-19 bukanlah pandemi pertama yang dialami di dunia dan Indonesia. Sejarah dunia mencatat wabah yang pernah terjadi misalnya, Pandemi Peloponesia 430 SM, Wabah Justinian 527-565 M, pandemi Black Death 1347-1351 M, cacar yang terjadi 1492, kolera sekitar tahun 1961, Flu Spanyol pada tahun 1918-1919, wabah SARS 2003, Flu Babi 2009, pandemi Ebola 2014 dan yang terakhir ini pandemi Covid-19 (Rusdi, 2020). Wabah yang terus terjadi mengharuskan masyarakat hidup berdampingan (*living in harmony*) dengan wabah.

Upaya pemerintah Kota Palopo dalam rangka hidup harmonis dengan ancaman Covid-

19 yaitu diterbitkannya Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tatanan Kebiasaan Baru pada Kondisi Pandemi Covid-19 di Kota Palopo. Peraturan tersebut mengharuskan bagi siapa saja yang berada di Kota Palopo untuk melakukan adaptasi dan perubahan perilaku dalam menjalankan aktivitas normal dengan memperhatikan protokol kesehatan. Selain itu, peraturan ini bermaksud untuk meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam penanggulangan pandemi Covid-19. Upaya tersebut mengharuskan pembagian kerja di kantor dan rumah. Kegiatan yang dilakukan dari rumah bukan berarti menjadi hambatan untuk mengembangkan diri. Kegiatan dari rumah justru harus menjadi peluang bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan melalui elektronik. Selain itu, kegiatan yang dilakukan di rumah harus memiliki tingkat produktivitas minimal sama dengan kegiatan di kantor. Kegiatan yang dilakukan di rumah dapat menghemat pengeluaran APBD.

Ketika masyarakat dapat mengubah bencana menjadi bagian dari kehidupan yang harus dijalani, maka masyarakat akan mampu mengurangi tingkat kerugian dan mampu membangun kembali kehidupan yang sempat terpuruk akibat Covid-19. Ketika masyarakat dapat hidup selaras dengan bencana, maka akan muncul ketahanan wilayah dalam menghadapi pandemi Covid-19 (Niam & Ardianto, 2013). Selain itu, pendapat (Kohlitz et al., 2017) *resilience* bertumpu pada cara masyarakat untuk mewujudkan kapasitas dalam rangka melawan keadaan darurat, khususnya untuk dapat pulih kembali dan sebagai bahan pembelajaran sehingga struktur sosial, politik, dan fisik yang baru dapat sejalan dengan kondisi lingkungan. Sehingga dalam melakukan *living in harmony with* Covid-19 harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Pada era globalisasi yang semakin canggih dan perkembangan teknologi yang terus berjalan

dengan masif, Covid-19 memberikan tantangan yang lebih kompleks. Cara penularan Covid-19 yang menular dari individu ke individu (*zoonosis*) (Liu et al., 2020) menyebabkan penanganan Covid-19 yang lebih sulit, terutama karena tingkat mobilitas manusia yang sangat tinggi. Pada sisi lain, Covid-19 muncul ketika dunia berada pada saat mengalami perkembangan teknologi yang sangat pesat. Maka penggunaan teknologi informasi sangat diperlukan untuk dapat hidup selaras dengan Covid-19, sehingga tercipta peluang ekonomi baru.

Upaya penanggulangan pandemi Covid-19 berbasis masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat dan Pemerintah Kota Palopo mampu mendukung ketahanan wilayah. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah angka harian masyarakat yang terpapar Covid-19 semakin menurun, jumlah kematian harian semakin menurun, tingkat kesembuhan semakin meningkat dan Covid-19 terkendali. Selain itu, penanggulangan pandemi Covid-19 Covid-19 di Kota Palopo mampu memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat, sehingga banyak dukungan dari berbagai elemen masyarakat, seperti akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha.

KESIMPULAN

Keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan pandemi Covid-19 sangat penting untuk intervensi risiko, termasuk pencegahan dan pengendalian. Pertama, Keterlibatan masyarakat Kota Palopo melalui Satgas Covid-19 dari tingkat Kota sampai Kelurahan melalui kolaborasi multisektor. Kedua, keterlibatan masyarakat Kota Palopo pencegahan dan pengendalian didasarkan atas kepercayaan terhadap pemerintah dan tokoh masyarakat. Ketiga, pemanfaatan mobilisasi sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat Kota Palopo. Komponen-komponen ini akan lebih efektif ketika penerapannya memperhatikan

lingkungan politik, ekonomi, sosial budaya masyarakat. Selain itu, pemerintah harus menjaga tingkat kepercayaan masyarakat sehingga mobilisasi dan pemanfaatan sumber daya lokal dapat dioptimalkan.

Kota Palopo memiliki ketahanan wilayah yang stabil dikarenakan memiliki perlindungan terhadap masyarakat, mekanisme mengelola sumber daya yang efektif; dapat mengembangkan mekanisme kerja yang efektif, mampu segera pulih dari bencana, dan dapat hidup berdampingan dengan risiko bencana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kota Palopo, Magister Manajemen Bencana Universitas Pertahanan Republik Indonesia, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, R., Dartanto, T., Sitompul, R., Susiloretni, K. A., Suparmi, Achadi, E. L., Taher, A., Wirawan, F., Sungkar, S., Sudarmono, P., Shankar, A. H., Thabrany, H., Susiloretni, K. A., Soewondo, P., Ahmad, S. A., Kurniawan, M., Hidayat, B., Pardede, D., Mundiharno, ... Khusun, H. (2019). Universal Health Coverage in Indonesia: Concept, Progress, and Challenges. *The Lancet*, 393(10166), 75–102. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(18\)31647-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31647-7)
- Alfaqi, M. Z., Habibi, M. M., & Rapita, D. D. (2017). Peran Pemuda dalam Upaya Pencegahan Korupsi dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 23(3), 320. <https://doi.org/10.22146/jkn.27695>
- Asrofi, A., Hardoyo, S. R., & Sri Hadmoko, D. (2017a). Strategi Adaptasi Masyarakat Pesisir Dalam Penanganan Bencana Banjir Rob Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi Di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Jawa Tengah). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 23(2), 1. <https://doi.org/10.22146/jkn.26257>
- Asrofi, A., Hardoyo, S. R., & Sri Hadmoko, D. (2017b). Strategi Adaptasi Masyarakat Pesisir Dalam Penanganan Bencana Banjir Rob Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi Di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Jawa Tengah). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 23(2), 1. <https://doi.org/10.22146/jkn.26257>
- Atkinson, J. A., Vallely, A., Fitzgerald, L., Whittaker, M., & Tanner, M. (2011). The Architecture and Effect of Participation: A systematic Review of Community Participation for Communicable Disease Control and Elimination. Implications for Malaria Elimination. *Malaria Journal*, 10, 1–33. <https://doi.org/10.1186/1475-2875-10-225>
- Chakraborty, I., & Maity, P. (2020). COVID-19 outbreak: Migration, effects on society, global environment and prevention. *Science of the Total Environment*, 728, 138882. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138882>
- Dewi, K. R. P., & Sunarta, I. N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali Dalam Menanggulangi COVID-19 Di Kota Denpasar. *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Dan Ilmu Komunikasi*, 7(2), 11–20. <https://doi.org/10.33084/restorica.v7i2.2585>
- Ha, B. T. T., Quang, L. N., Thanh, P. Q., Duc, D. M., Mirzoev, T., & Bui, T. M. A. (2021). Community Engagement in The Prevention and Control of Covid-19: Insights from Vietnam. *PLoS ONE*, 16(9), 1–18. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0254432>
- Hankivsky, O., Grace, D., Hunting, G., Giesbrecht, M., Fridkin, A., Rudrum, S., Ferlatte, O., & Clark, N. (2014). An Intersectionality-Based Policy Analysis Framework: Critical Reflections on a Methodology for Advancing Equity. *International Journal for Equity in Health*, 13(119), 133–166.

- https://doi.org/10.1007/978-3-319-98473-5_6
- Kohlitz, J. P., Chong, J., & Willetts, J. (2017). Climate change vulnerability and resilience of water, sanitation, and hygiene services: A theoretical perspective. *Journal of Water Sanitation and Hygiene for Development*, 7(2), 181–195. <https://doi.org/10.2166/washdev.2017.134>
- Legionosuko, T., Adnan Madjid, M., Asmoro, N., & Samudro, E. G. (2019). Posisi dan Strategi Indonesia dalam Menghadapi Perubahan Iklim guna. *Mendukung Ketahanan Nasional JURNAL KETAHANAN NASIONAL*, 25(3), 295–312. <https://doi.org/10.22146/jkn.50907>
- Liu, T., Liu, T., Hu, J., Kang, M., Lin, L., Zhong, H., Xiao, J., He, G., Song, T., Huang, Q., Rong, Z., Deng, A., Zeng, W., Tan, X., Zeng, S., Zhu, Z., Li, J., Wan, D., Lu, J., ... He, J. (2020). Transmission dynamics of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV). *BioRxiv Preprint*. <https://doi.org/10.1101/2020.01.25.919787>.
- Mahendradhata, Y., Andayani, N. L. P. E., Hasri, E. T., Arifi, M. D., Siahaan, R. G. M., Solikha, D. A., & Ali, P. B. (2021). The Capacity of the Indonesian Healthcare System to Respond to COVID-19. *Frontiers in Public Health*, 9(July), 1–9. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.649819>
- Masudi, W., & Winanti, P. S. (2020). *Tata Kelola Penanganan Covid-19 di Indonesia: Kajian Awal* (Ed). Gajah Mada University Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. 3rd.
- Niam, L., & Ardianto, H. T. (2013). Kolaborasi Menuju Resiliensi: Pengalaman Pemuda Ende dalam Pengurangan Risiko Bencana. *Jurnal Studi Pemuda*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.32052>
- Rusdi. (2020). Pandemi Penyakit dalam Lintasan Sejarah dan Dampaknya Terhadap Gejolak Sosial Politik. *Diakronika*, 20(1), 50–60. <https://doi.org/10.24036/diakronika/vol20-iss1/146>
- Silva, D. S., Smith, M. J., & Upshur, R. E. G. (2013). Disadvantaging the disadvantaged: When public health policies and practices negatively affect marginalized populations. *Canadian Journal of Public Health*, 104(5), 410–412. <https://doi.org/10.17269/cjph.104.3895>
- Simsa, R., Yuen, J., Stout, A., Rubio, N., Fogelstrand, P., & Kaplan, D. L. (2019). Extracellular heme proteins influence bovine myosatellite cell proliferation and the color of cell-based meat. *Foods*, 8(10). <https://doi.org/10.3390/foods8100521>
- Suherningtyas, I. A., Pitoyo, A. J., Permatasari, A. L., & Febiarta, E. (2021). Kapasitas Ketahanan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Pandemi Covid-19 Di Wilayah Perkotaan (Studi Kasus : Kampung Krasak RT 16 , RW 04 , Kelurahan Kotabaru , Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM Indonesia Tentang Penanggulangan Bencana bencana. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 27(1), 16–38. <https://doi.org/10.22146/jkn.62013>
- Wardhana, D. (2020). Kajian Kebijakan dan Arah Riset Pasca-Covid-19. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 223–239. <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.110>
- Whalen, J., Morris, L., & McCoy, T. (2020). *White House scrambles to scoop up medical supplies worldwide , angering*. 200. <https://www.washingtonpost.com/business/2020/04/03/white-house-scrambles-scoop-up-medical-supplies-angering-canada-germany/>